

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SINGARAJA**

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

Jl. Udayana no.10 Singaraja

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah KEMENTERIAN KEUANGAN yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satker KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Singaraja, 7 Mei 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Purwoko

NIP. 197911062002121001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Laporan Operasional
- 2 Laporan Perubahan Ekuitas
- 3 Neraca Percobaan Tahun 2024
- 4 Laporan Neraca Tahun 2024
- 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- 6 Laporan Realisasi Belanja Tahun 2024
- 7 Laporan Pengembalian Belanja Tahun 2024
- 8 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2024
- 9 Laporan Pengembalian Pendapatan Tahun 2024
- 10 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024
- 11 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024
- 12 Laporan Posisi Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024
- 13 Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN
- 14 Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBPN
- 15 Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

JL. UDAYANA NO.10 SINGARAJA SINGARAJA
TELEPON 0362-32811, FAXIMILE 0362-32814

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singaraja, 7 Mei 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Purwoko

NIP. 197911062002121001



Laporan Keuangan KPKNL Singaraja Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited)

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.159.076.414 atau mencapai 174,91% persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp2.949.612.000.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.799.653.167 atau mencapai 97,07% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.854.009.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

Uraian	periode 31 Desember 2024			periode 31 Desember 2022
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2.949.612.000	5.159.076.414	174,91%	3.647.539.250
Belanja Negara	1.854.009.000	1.799.653.167	97,07%	1.192.309.928

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024 (Audited).

Nilai Aset per 31 Desember 2024 (Audited) dicatat dan disajikan sebesar Rp4.351.727.341 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp93.494.063, Aset Tetap sebesar Rp4.254.288.578, Piutang Jangka Panjang Rp0 dan Aset Lainnya senilai Rp3.944.700.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp91.667.979 dan Rp4.260.059.362

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi. Surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan_LO untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.896.611.932,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.070.086.440,- sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasional senilai Rp826.525.492,-"

Kegiatan Non Operasional surplus Rp77.061.999,- yang berasal atas pendapatan pelepasan aset non lancar sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp903.587.491,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp4.141.884.331,- ditambah surplus-LO sebesar Rp903.587.491,- kemudian ditambah dengan koreksi nilai tahun berjalan sebesar Rp0,- dan transaksi antar entitas sebesar (Rp956.630.408,-) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah

senilai Rp4.088.841.414,-

Tabel 2
Ringkasan Neraca 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)	periode 31 Desember 2023 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	93.494.063	10.700.007	82.794.056	773,78%
Aset Tetap	4.254.288.578	4.035.504.353	218.784.225	5,42%
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
Aset Lainnya	3.944.700	3.944.700	-	0,00%
Jumlah Aset	4.351.727.341	4.050.149.060	301.578.281	7,45%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	91.667.979	10.649.026	81.018.953	760,81%
Ekuitas				
Ekuitas	4.260.059.362	4.039.500.034	220.559.328	5,46%
Jumlah Ekuitas Dana	4.260.059.362	4.039.500.034	220.559.328	5,46%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.351.727.341	4.050.149.060	301.578.281	7,45%

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir dengan tanggal 31 Desember 2024 (Audited) disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)			31 Desember 2023 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.949.612.000	5.159.076.414	174,91%	3.647.539.250
Jumlah Pendapatan		2.949.612.000	5.159.076.414	174,91%	3.647.539.250
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0,00%	0
Belanja Barang	B.4	1.469.569.000	1.418.113.167	96,50%	1.156.135.428
Belanja Modal	B.5	384.440.000	381.540.000	99,25%	36.174.500
Jumlah Belanja		1.854.009.000	1.799.653.167	97,07%	1.192.309.928

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	89.687.779	8.728.140
Piutang PNBPNP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	2.083.333	-
Persediaan	C.9	1.722.951	1.971.867
Persediaan yang belum diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		93.494.063	10.700.007
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/ TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	2.891.064.520	2.891.064.520
Peralatan dan Mesin	C.14	4.142.695.974	4.146.434.812
Gedung dan Bangunan	C.15	1.086.813.114	1.086.813.114
Jalan, Irigasi, dan jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	12.118.200	12.118.200
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(3.878.403.230)	(4.100.926.293)
Jumlah Aset Tetap		4.254.288.578	4.035.504.353
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-lain	C.21	420.668.538	23.489.700
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(416.723.838)	(19.545.000)
Jumlah Aset Lainnya		3.944.700	3.944.700
JUMLAH ASET		4.351.727.341	4.050.149.060

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	91.667.979	10.649.026
Utang yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		91.667.979	10.649.026
JUMLAH KEWAJIBAN		91.667.979	10.649.026
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	4.260.059.362	4.039.500.034
JUMLAH EKUITAS		4.260.059.362	4.039.500.034
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.351.727.341	4.050.149.060

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0
Pendapatan PPN dan BM		0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0
Pendapatan BPHTB		0	0
Pendapatan Cukai		0	0
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0
Pendapatan Bea Masuk		0	0
Pendapatan Bea Keluar		0	0
Beban Lain-lain		0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		5.159.076.414	3.570.477.251
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.159.076.414	3.570.477.251
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		5.159.076.414	3.570.477.251
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	123.737.391	72.473.930
Beban Barang dan Jasa	D.4	666.692.922	634.446.265
Beban Pemeliharaan	D.5	205.988.336	175.310.200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	419.919.415	274.051.599
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		0	0
Beban Bunga		0	0
Beban Subsidi		0	0
Beban Hibah		0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	173.168.275	170.131.171
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	0
Beban Transfer		0	0
Beban Lain-lain		0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.589.506.339	1.326.413.165
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.569.570.075	2.244.064.086

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	77.061.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah surplus/ (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	77.061.999
SURPLUS/ (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah surplus/ (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	
Beban dari Kegiatan Non operasional Lainnya		0	
Jumlah surplus/ (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	77.061.999
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/ DEFISIT LO		3.569.570.075	2.321.126.085

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
EKUITAS AWAL	E.1	4.039.500.034	4.141.884.331
SURPLUS/ DEFISIT LO	E.2	3.569.570.075	2.321.126.085
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	-3.349.010.747	-2.423.510.382
KENAIKAN/ PENURUNAN ENTITAS		220.559.328	-102.384.297
EKUITAS AKHIR	E.5	4.260.059.362	4.039.500.034

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum entitas dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Singaraja

KPKNL Singaraja adalah salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut KPKNL Singaraja berkomitmen dengan visi 'Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.'

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Singaraja menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Singaraja menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akruar adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Singaraja dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan - LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAK 423293). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
- Penerimaan atas kertas sekuriti untuk pembuatan kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAK 423293). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke kas negara
- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan pembeli atas lelang pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAK 423293) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
- Penerimaan atas pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAK 423999) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
- Penerimaan atas pemberian ijin operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAK 423999). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
- Penerimaan atas perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAK 423999). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara
- Penerimaan Denda keterlambatan penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAK 423293). Pendapatan diakui ketika diketahui Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II terlambat menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi laporan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II oleh Kanwil DJKN.
- Penerimaan Bea Lelang batal atas permintaan penjual (setoran SSBP menggunakan MAK 423227). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetorkan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAK 423227) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Pendapatan diakui ketika pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL.
- Penerimaan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara oleh Penanggung Hutang. (setoran SSBP menggunakan MAK 423228). Pendapatan diakui ketika telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima dan telah masuk ke Rekening penampungan piutang dan telah terverifikasi.

- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari pembeli wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAK 423291). Pendapatan diakui saat ditetapkannya pembeli lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang tidak diambil (setoran SSBP menggunakan MAK 423291). Pendapatan diakui 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik atau Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAK 423998). Pendapatan diakui setelah 3 kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui surat kabar harian dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan Pemohon lelang tidak bersedia mengambil/mencairkan cek/ BG (setoran SSBP menggunakan MAK 423998). Pendapatan diakui saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan atas penyetoran piutang negara yang tidak jelas (setoran SSBP menggunakan MAK 423999). Pendapatan diakui setelah proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke rekening penampungan piutang dan telah disetor ke Kas Negara.
- Pendapatan sewa Gedung (rumah negara) diakui setelah diterbitkannya surat ijin menempati rumah negara oleh Kepala Kantor.
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan Banguna serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup Objek Revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka Revaluasi dilakukan dengan pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi Anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Nilai Aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil Revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil Revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan ,Irigasi , dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amant PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Singaraja telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan belanja terkait tambahan atas Rincian Output Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan.

Perubahan berdasarkan jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran setelah revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.452.939.000	1.469.569.000
Belanja Modal	384.440.000	384.440.000
Jumlah	1.837.379.000	1.854.009.000

Realisasi
Pendapatan
Rp5.159.076.414

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.159.076.414 atau mencapai 174,91% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.949.612.000. Pendapatan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA adalah merupakan Pendapatan Penjualan dan Pendapatan pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2024

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pend. Penjualan dan Pendapatan Pengelolaan BMN (4251)	0	0	0,00%
2	Pend. Jasa (4232)	2.949.612.000	5.154.255.760	174,74%
3	Pend. Lain-lain (4239)	0	4.820.654	0,00%
	Jumlah	2.949.612.000	5.159.076.414	174,91%

Realisasi Pendapatan Jasa periode 31 Desember 2024 Mengalami Kenaikan sebesar Rp1.530.850.777 atau 42,19% persen dibandingkan periode 31 Desember 2023.

Perbandingan realisasi PNBPN periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pend. Penjualan dan Pendapatan Pengelolaan BMN (4231)	0	77.061.999	-77.061.999	-100,00%
2	Pend. Jasa (4232)	5.154.255.760	3.551.162.194	1.603.093.566	45,14%
3	Pend. Lain-lain (4239)	4.820.654	1.444	4.819.210	333740,30%
	Jumlah	5.159.076.414	3.628.225.637	1.530.850.777	42,19%

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara
Rp1.799.653.167

Realisasi belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.799.653.167 atau sebesar 97,07% persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Kantor KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA Tahun adalah sebesar Rp1.854.009.000. Anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
Belanja Pegawai	0	0	0,00%
Belanja Barang	1.469.569.000	1.418.113.167	96,50%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%
Belanja Modal	384.440.000	381.540.000	99,25%
Total Belanja Kotor	1.854.009.000	1.799.653.167	97,07%
Pengembalian Belanja	0	0	0,00%
Jumlah	1.854.009.000	1.799.653.167	97,07%

Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024 Mengalami Kenaikan sebesar Rp607.343.239 atau 50,94% persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat kenaikan pada belanja barang operasional dan belanja perjalanan dinas dalam negeri, disamping itu frekuensi perjalanan dinas yang tinggi juga meningkatkan belanja BBM

Disamping itu, terdapat belanja modal senilai Rp36.174.500,- berupa :

1. Pembelian kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp328.000.000,00,
2. Pembelian 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda dua dengan nilai sebesarRp53.540.000,00..

Perbandingan Realisasi Belanja 2024 dan 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00%
Belanja Barang	1.418.113.167	1.156.135.428	261.977.739	22,66%
Bantuan Sosial	0	0	0	0,00%
Belanja Modal	381.540.000	36.174.500	345.365.500	954,72%
Jumlah	1.799.653.167	1.192.309.928	607.343.239	50,94%

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai tidak ada perubahan / nihil

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Gaji Pokok Peg. Non PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Honorarium	0	0	0	0,00%
Belanja Lembur	0	0	0	0,00%
Belanja Vakasi	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0,00%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	0,00%

Belanja Barang
Rp1.418.113.167

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.418.113.167 dan Rp1.156.135.428. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,18% dari Realisasi Belanja TA 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja barang persediaan konsumsi dikarenakan belanja persediaan komputer meningkat. Selain itu, terdapat peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dikarenakan terdapat Rincian Output baru pada bidang Pelayanan Lelang, yaitu Penggalan Potensi Lelang dan Risalah Lelang UMKM dengan kegiatan berupa perjalanan dinas.

Perbandingan Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	542.558.750	591.148.050	-48.589.300	-8,22%
Belanja Barang Non Operasional	83.958.000	21.189.800	62.768.200	296,22%
Belanja Jasa	42.200.191	22.519.979	19.680.212	87,39%
Belanja Pemeliharaan	205.988.336	175.310.200	30.678.136	17,50%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123.488.475	71.915.800	51.572.675	71,71%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	419.919.415	274.051.599	145.867.816	53,23%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Bruto	1.418.113.167	1.156.135.428	261.977.739	22,66%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Netto	1.418.113.167	1.156.135.428	261.977.739	22,66%

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp381.540.000

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp381.540.000 dan Rp36.174.500.

Belanja modal senilai Rp36.174.500,- berupa :

1. Pembelian kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp328.000.000,00,
2. Pembelian 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda dua dengan nilai sebesar Rp53.540.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	381.540.000	36.174.500	345.365.500	954,72%
Realisasi Belanja Bruto	381.540.000	36.174.500	345.365.500	954,72%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Netto	381.540.000	36.174.500	345.365.500	954,72%

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal tidak ada Perubahan / Nihil

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Rumah Dinas Permanen	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0,00%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	0,00%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
1	Uang Muka dari KPPN	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
3	Kuitansi yang belum di-SP2D-kan	Rp -	Rp -
4	Pembulatan	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp89.687.779*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan menjadi penerimaan negara , baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Jumlah tersebut terdiri dari:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 89.670.296
2	Lain- Lain Piutang	Rp 17.483
	Jumlah	Rp 89.687.779

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp89.687.779*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp89.687.779 dan Rp8.728.140 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan menjadi penerimaan negara , baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Jumlah tersebut terdiri dari:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	jasa giro yg belum disetor	Rp -
2	pungutan pajak yang belum disetor	Rp -
3	pendapatan hibah	Rp -
4	pengemb. Belanja yg blm disetor ke Kas Negara	Rp -
5	SP2D LS Bendahara yg blm dibayarkan	Rp -
6	Dana Pihak Ketiga	Rp 89.687.779
7	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -
	Jumlah	Rp 89.687.779

*Belanja Dibayar Di
Muka Rp2.083.333*

C.8 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) masing-masing adalah sebesar Rp2.083.333 dan Rp0. Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan. "

Persediaan
Rp1.722.951

C.9. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) masing-masing adalah sebesar Rp1.722.951 dan Rp1.971.867 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Barang Konsumsi	Rp 1.722.951	Rp 1.971.867
2	Amunisi	Rp -	Rp -
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -
4	Bahan Baku	Rp -	Rp -
5	Persediaan untuk tujuan strategis	Rp -	Rp -
6	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 1.722.951	Rp 1.971.867

Tanah
Rp2.891.064.520

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.891.064.520 dan Rp2.891.064.520 .

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2024 (Audited) terdiri dari:

Tabel 24

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	1	800 m2	Rp 2.891.064.520
Jumlah			Rp 2.891.064.520

Peralatan dan
Mesin
Rp4.142.695.974

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.142.695.974 dan Rp4.146.434.812 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada adalah sebesar Rp381.540.000 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp381.540.000.

Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai sebagai Peralatan dan Mesin.

Penurunan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per periode 31 Desember 2023	Rp	4.146.434.812
Mutasi tambah:		
- Saldo Awal	Rp	-
- Pembelian	Rp	381.540.000
- Transfer Masuk	Rp	11.900.000
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Lain-Lain	Rp	-
	Rp	393.440.000
Mutasi kurang:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Lain-lain	Rp	397.178.838
	Rp	397.178.838
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) sebelum Penyusutan	Rp	4.142.695.974
Penyusutan	Rp	(3.904.841.545)
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) Setelah Penyusutan	Rp	237.854.429

Gedung dan
Bangunan
Rp1.086.813.114

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp964.225.800 dan Rp1.086.813.114 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per periode 31 Desember 2023	Rp	1.086.813.114
Mutasi tambah:		
- Saldo Awal	Rp	-
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Lain-Lain	Rp	-
	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Lain-lain	Rp	-
	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) sebelum Penyusutan	Rp	1.086.813.114
Penyusutan	Rp	(122.587.314)
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) Setelah Penyusutan	Rp	964.225.800

Aset Tetap Lainnya
Rp12.118.200

C.17 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.118.200 dan Rp12.118.200 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap -
Rp3.878.403.230

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar -Rp3.878.403.230 dan -Rp4.100.926.293 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Lain-Lain
Rp420.668.538

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp420.668.538 dan Rp23.489.700 setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA serta dalam proses penghapusan dari BMN

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per periode 31 Desember 2023	Rp	23.489.700
Mutasi tambah:		
- Penghentian BMN dari penggunaan	Rp	397.178.838
Mutasi kurang:		
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) sebelum penyusutan	Rp	420.668.538
Penyusutan	Rp	(416.723.838)
Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) Setelah Penyusutan	Rp	3.944.700

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya -
Rp416.723.838

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar -Rp416.723.838 dan -Rp19.545.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp91.667.979

C.24 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp91.667.979 dan Rp10.649.026. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Beban yang masih
harus dibayar Rp0

C.26 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya

Ekuitas Dana
Lancar
Rp4.260.059.362

C.27 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.260.059.362 dan Rp4.039.500.034 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp5.159.076.414

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.159.076.414 dan Rp3.570.477.251. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan negara bukan pajak lainnya	Rp 5.159.076.414	Rp 3.570.477.251	44,49%
2		Rp -	Rp -	
3		Rp -	Rp -	
	Jumlah	Rp 5.159.076.414	Rp 3.570.477.251	44,49%

Pendapatan jasa merupakan Pendapatan L-O yang diperoleh dari Lelang dan Pengurusan Piutang dan Negara. Sedangkan Pendapatan Lain-lain LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2024 dan 2023.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negei Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban gaji	Rp -	Rp -	-
2	Beban Tunjangan-tunjangan	Rp -	Rp -	-
3	Beban Honorarium dan Vakasi	Rp -	Rp -	-
4	Beban Lembur	Rp -	Rp -	-
5	Pengembalian belanja pegawai	Rp -	Rp -	-
	Jumlah	Rp -	Rp -	-

Beban Persediaan
Rp123.737.391

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp123.737.391 dan Rp72.473.930 Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk tahun 20123 dan 2022 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER TA 2024 (AUDITED)

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 123.737.391	Rp 72.473.930	70,7%
2	Beban Persediaan untuk pemeliharaan	Rp -	Rp -	
3	Beban Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp -	
4	Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	
	Jumlah	Rp 123.737.391	Rp 72.473.930	0,71

*Beban Barang dan
Jasa
Rp490.876.935*

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp490.876.935 dan Rp484.718.584. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	Rp 276.016.350	Rp 257.456.562	7,21%
2	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 10.587.200	Rp -	
3	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 24.309.500	Rp 20.993.000	
4	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 100.320.000	Rp 94.880.000	
5	Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 43.090.000	Rp 40.400.800	
6	Beban Barang Operasional Lainnya- Penanganan Covid	Rp 3.947.400	Rp 35.702.652	
7	Beban Bahan	Rp 9.639.400	Rp 7.181.600	
8	Beban Honor Output Kegiatan	Rp -	Rp -	
9	Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 5.400.000	Rp 3.600.000	
10	Beban Langganan Telepon	Rp 11.291.085	Rp 12.044.970	-6,26%
11	Beban Sewa		Rp 4.600.000	-100%
12	Beban Jasa-Penanganan Covid	Rp 6.276.000	Rp 7.859.000	
13	Beban Jasa Profesi	Rp -	Rp -	
	Jumlah	Rp 490.876.935	Rp 484.718.584	1,27%

*Beban
Pemeliharaan
Rp158.223.400*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp158.223.400 dan Rp148.679.441. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00%
2	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp 158.223.400	Rp 148.679.441	6,42%
3	Beban pemeliharaan Lainnya	Rp -		0,00%

LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER TA 2024 (AUDITED)

	Jumlah	Rp 158.223.400	Rp 148.679.441	6,42%
--	--------	----------------	----------------	-------

LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER TA 2024 (AUDITED)

Beban Perjalanan Dinas
Rp256.628.599

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp256.628.599 dan Rp179.219.630. Beban Tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untu Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Biasa	Rp 235.852.599	Rp 159.669.630	47,71%
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 20.776.000	Rp 19.550.000	6,27%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	Rp -	Rp -	0,00%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	Rp -	Rp -	0,00%
	Jumlah	Rp 256.628.599	Rp 179.219.630	43,19%

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp96.967.514

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp96.967.514 dan Rp89.069.779. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 86.253.895	Rp 78.356.160	10,08%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 10.713.619	Rp 10.713.619	0,00%
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp -	Rp -	0,00%
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		Rp -	0,00%
	Jumlah Penyusutan	Rp -	Rp -	
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	0,00%
2	Beban Penyusutan Aset lain-lain		Rp -	0,00%
	Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp -	
	Jumlah	Rp 96.967.514	Rp 89.069.779	8,87%

Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 (Audited) dan periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
1	Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0,00%
2	Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp -	Rp -	0,00%
	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp -	Rp -	0,00%

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i> Rp4.141.884.331,-	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.141.884.331,- dan Rp4.220.082.159,-
<i>Surplus LO</i> Rp903.587.491,-	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.569.570.075,- dan Rp2.321.126.085,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa
<i>Koreksi Nilai</i> <i>Persediaan Rp0,-</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Aset Tetap</i> Rp0,-	E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-
<i>Koreksi Aset Tetap</i> Rp0,-	E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,-
<i>Transaksi Antar</i> <i>Entitas</i> (Rp956.630.408,-)	E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp3.349.010.747,-) dan (Rp2.423.510.382,-). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
<i>Ekuitas Akhir</i> Rp4.088.841.414,-	E.5 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp4.260.059.362,- dan Rp4.039.500.034,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. KPKNL Singaraja TA 2023 hanya mengelola satu Bagian Anggaran yaitu 015.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan butir kedua yang berbunyi: Menunjuk Kepala Satuan Kerja pada Satuan Kerja setingkat eselon II, eselon III, dan eselon IV di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja berkenaan, Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil XIV DJKN Denpasar Nomor: KEP-01/WKN.14/2013 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Singaraja Nomor: KEP-113/KNL.1402/2024 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada KPKNL Singaraja Tahun Anggaran 2024, maka Pejabat Pengelola Keuangan KPKNL Singaraja adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Adi Purwoko
Pejabat Pembuat Komitmen	: I Made Adi Wasgita
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Rudiyanto Sjahril
Bendahara Pengeluaran	: Putu Hendra Sastra Winata
Bendahara Penerimaan	: Galih Dahana

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG SINGARAJA

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 7:46 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,159,076,414	3,570,477,251	1,588,599,163	44.493
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,159,076,414	3,570,477,251	1,588,599,163	44.493
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,159,076,414	3,570,477,251	1,588,599,163	44.493
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	123,737,391	72,473,930	51,263,461	70.734
Beban Barang dan Jasa	666,692,922	634,446,265	32,246,657	5.083
Beban Pemeliharaan	205,988,336	175,310,200	30,678,136	17.499
Beban Perjalanan Dinas	419,919,415	274,051,599	145,867,816	53.226
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
 LELANG SINGARAJA

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 7:46 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	173,168,275	170,131,171	3,037,104	1.785
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,589,506,339	1,326,413,165	263,093,174	19.835
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	3,569,570,075	2,244,064,086	1,325,505,989	59.067
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	77,061,999	(77,061,999)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	77,061,999	(77,061,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	77,061,999	(77,061,999)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3,569,570,075	2,321,126,085	1,248,443,990	53.786
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	3,569,570,075	2,321,126,085	1,248,443,990	53.786

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SINGARAJA

Tgl Data : 11/02/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 7:47 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,039,500,034	4,141,884,331	(102,384,297)	(2.47)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,569,570,075	2,321,126,085	1,248,443,990	53.79
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,349,010,747)	(2,423,510,382)	(925,500,365)	38.19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	220,559,328	(102,384,297)	322,943,625	(315.42)
EKUITAS AKHIR	4,260,059,362	4,039,500,034	220,559,328	5.46

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SINGARAJA

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 7:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	89,687,779	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	2,083,333	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,722,951	0
0.0	131111	Tanah	2,891,064,520	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,142,695,974	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,086,813,114	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,118,200	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,723,675,059
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	154,728,171
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	420,668,538	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	416,723,838
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,980,200
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	89,687,779
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,799,653,167
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,159,076,414	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,412,500
0.0	391111	Ekuitas	0	4,039,500,034
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	4,042,966,836
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	656,249,805
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	455,039,119
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,820,654
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	395,866,250	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16,146,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,363,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89,921,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,290,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	73,158,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,800,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,231,505	0
3.0	522141	Beban Sewa	22,916,667	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205,988,336	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	375,359,415	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,560,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151,741,037	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,427,238	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	123,737,391	0
JUMLAH			15,395,437,162	15,395,437,162

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SINGARAJA

Tgl Data : 11/02/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 7:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	89,687,779	8,728,140	80,959,639	927.57
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,083,333	0	2,083,333	0.00
Persediaan	1,722,951	1,971,867	(248,916)	(12.62)
JUMLAH ASET LANCAR	93,494,063	10,700,007	82,794,056	773.78
ASET TETAP				
Tanah	2,891,064,520	2,891,064,520	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,142,695,974	4,146,434,812	(3,738,838)	(0.09)
Gedung dan Bangunan	1,086,813,114	1,086,813,114	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	12,118,200	12,118,200	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,878,403,230)	(4,100,926,293)	222,523,063	(5.43)
JUMLAH ASET TETAP	4,254,288,578	4,035,504,353	218,784,225	5.42
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	420,668,538	23,489,700	397,178,838	1,690.86
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(416,723,838)	(19,545,000)	(397,178,838)	2,032.13
JUMLAH ASET LAINNYA	3,944,700	3,944,700	0	0.00
JUMLAH ASET	4,351,727,341	4,050,149,060	301,578,281	7.45
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	91,667,979	10,649,026	81,018,953	760.81
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	91,667,979	10,649,026	81,018,953	760.81
JUMLAH KEWAJIBAN	91,667,979	10,649,026	81,018,953	760.81
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,260,059,362	4,039,500,034	220,559,328	5.46
JUMLAH EKUITAS	4,260,059,362	4,039,500,034	220,559,328	5.46
JUMLAH EKUITAS	4,260,059,362	4,039,500,034	220,559,328	5.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,351,727,341	4,050,149,060	301,578,281	7.45

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA 525591

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM
Tgl Cetak : 11/02/25 7:48 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,854,009,000	1,799,653,167	(54,355,833)	97	1,308,382,000	1,192,309,928	116,072,072	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 014
SATUAN KERJA : 525591
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
BALI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 11/02/25 8:10 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 10/2/25 12:40 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	396,003,000	396,003,000	395,466,250	0	395,466,250	99.86	536,750
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	16,416,000	16,416,000	16,146,500	0	16,146,500	98.36	269,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36,000,000	36,000,000	35,735,000	0	35,735,000	99.26	265,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,288,000	90,288,000	89,921,000	0	89,921,000	99.59	367,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,400,000	5,400,000	5,290,000	0	5,290,000	97.96	110,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	544,107,000	544,107,000	542,558,750	0	542,558,750	99.72	1,548,250
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	39,730,000	78,595,000	73,158,000	0	73,158,000	93.08	5,437,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,584,000	11,584,000	10,800,000	0	10,800,000	93.23	784,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	51,314,000	90,179,000	83,958,000	0	83,958,000	93.1	6,221,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123,838,000	123,838,000	123,488,475	0	123,488,475	99.72	349,525
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	123,838,000	123,838,000	123,488,475	0	123,488,475	99.72	349,525
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	18,000,000	17,200,191	0	17,200,191	95.56	799,809
522141	Belanja Sewa	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	43,000,000	43,000,000	42,200,191	0	42,200,191	98.14	799,809
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206,308,000	206,308,000	205,988,336	0	205,988,336	99.85	319,664
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	206,308,000	206,308,000	205,988,336	0	205,988,336	99.85	319,664
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	398,966,000	406,997,000	375,359,415	0	375,359,415	92.23	31,637,585
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85,406,000	55,140,000	44,560,000	0	44,560,000	80.81	10,580,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	484,372,000	462,137,000	419,919,415	0	419,919,415	90.86	42,217,585
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,452,939,000	1,469,569,000	1,418,113,167	0	1,418,113,167	96.5	51,455,833
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384,440,000	384,440,000	381,540,000	0	381,540,000	99.25	2,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	384,440,000	384,440,000	381,540,000	0	381,540,000	99.25	2,900,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	384,440,000	384,440,000	381,540,000	0	381,540,000	99.25	2,900,000
	JUMLAH BELANJA	1,837,379,000	1,854,009,000	1,799,653,167	0	1,799,653,167	97.07	54,355,833

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 525591

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
BALI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 11/02/25 8:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,840,833,000	4,042,966,836	0	4,042,966,836	219.63
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,103,568,000	656,249,805	0	656,249,805	59.47
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	5,211,000	455,039,119	0	455,039,119	8732.28
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	2,949,612,000	5,154,255,760	0	5,154,255,760	174.74
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,820,654	0	4,820,654	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,820,654	0	4,820,654	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,949,612,000	5,159,076,414	0	5,159,076,414	174.91
	JUMLAH PENDAPATAN	2,949,612,000	5,159,076,414	0	5,159,076,414	174.91

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-015.09.2.525591/2024

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (22.01) BALI / KAB. BULELENG

KPPN : (132) Singaraja

Satuan Kerja : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Alamat dan No Telp : Jl. Udayana 10 (GKN II) Singaraja , 036232811

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00154/DRPP/525591/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	511.600,00	389.786.355,00	390.297.955,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	511.600,00	389.786.355,00	390.297.955,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	511.600,00	198.318.300,00	198.829.900,00	0,00
	1. BP UP*)	511.600,00	108.295.100,00	108.806.700,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	823.200,00	823.200,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena -
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
ADI PURWOKO

NIP 197911062002121001

KAB. BULELENG, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
PUTU HENDRA SASTRA WINATA

NIP 199012302013101001



Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890145255911000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00154/DRPP/525591/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
PUTU HENDRA SASTRA WINATA
NIP 199012302013101001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
ADI PURWOKO
NIP 197911062002121001



***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 525591

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890145255911000	BPg 132 KPKNL Singaraja	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2024-12-30	0.00
2	00000000497043924	RPL 132 KPKNL SINGARAJA UTK PS TKPKN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - SINGARAJA	30	S-10076/MK.5/2016	14-12-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



Ditandatangani secara elektronik
PUTU HENDRA SASTRA WINATA

NIP 199012302013101001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (22.01) BALI / KAB. BULELENG
 Satuan Kerja : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA52559100-
 No Rekening : 9890145255911000
 Nama Rekening : BPg 132 KPKNL Singaraja
 Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC PECENONGAN
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			459.845,00
02-12-2024	FPK-PENG-yl0Im7QZR3fsPv9	SPM GUP	41.488.400,00	0,00	41.948.245,00
03-12-2024	FPK-PENG-zxQWc4qEJfR7rXh	SPM UP RM	21.106.700,00	0,00	63.054.945,00
03-12-2024	FPK-PENG-hWSXvqE01TvPnW	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	41.500.000,00	21.554.945,00
04-12-2024	FPK-PENG-qgTOTJ8JdFWIW2N	SPM TUP	89.200.000,00	0,00	110.754.945,00
05-12-2024	FPK-PENG-vTCRGhThlic4jFG	SPM UP PNBPN	45.700.000,00	0,00	156.454.945,00
05-12-2024	FPK-PENG-iFmEQujid0soD9i	[DARI TUNAI] Penarikan tunai	0,00	21.000.000,00	135.454.945,00
05-12-2024	FPK-PENG-AS8ym1XPWsr3adU	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	14.500.000,00	120.954.945,00
05-12-2024	FPK-PENG-8noYMm54HxpzoNL	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	9.500.000,00	111.454.945,00
11-12-2024	00021/BP/525591/2024	Honorarium November 2024	411.600,00	0,00	111.866.545,00
11-12-2024	00022/BP/525591/2024	Honorarium Desember 2024	411.600,00	0,00	112.278.145,00

1	2	3	4	5	6
11-12-2024	FPK-PENG-GEUVofHlxsoAQYI	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	823.200,00	111.454.945,00
11-12-2024	00030/SSP/525591/2024	-	0,00	411.600,00	111.043.345,00
11-12-2024	00031/SSP/525591/2024	-	0,00	411.600,00	110.631.745,00
16-12-2024	FPK-PENG-IWhw1I24ZCmkUZW	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	30.000.000,00	80.631.745,00
16-12-2024	FPK-PENG-o8tKkwQVNgVz3aS	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	10.000.000,00	70.631.745,00
18-12-2024	FPK-PENG-zG4Tv2eb8zf2Wrm	[DARI TUNAI] Setor Bank	568.055,00	0,00	71.199.800,00
18-12-2024	FPK-PENG-4aBy0tP1LK3JbFI	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	568.055,00	70.631.745,00
23-12-2024	FPK-PENG-YettQUZn0gKRmOR	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	20.000.000,00	50.631.745,00
23-12-2024	FPK-PENG-azN1NQN7b35RPc2	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	15.000.000,00	35.631.745,00
27-12-2024	00660/SSBP/525591/2024	Setor Sisa UP RM 2024	0,00	7.623.000,00	28.008.745,00
27-12-2024	FPK-PENG-f9wjoye4RNYMiVx	SPM GUP NIHIL RM	0,00	0,00	28.008.745,00
30-12-2024	FPK-PENG-tDrjmY85HUCYbmJ	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	16.808.745,00	11.200.000,00
30-12-2024	FPK-PENG-8YVByK4qsRIEqZ	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	11.200.000,00	0,00
30-12-2024	FPK-PENG-YeZdfNDd0CnSfHI	SPM PTUP	0,00	0,00	0,00
30-12-2024	FPK-PENG-xZBOfWt5TPTE2Fd	SPM GUP PNBPNIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			198.886.355,00	199.346.200,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

Ditandatangani secara elektronik
PUTU HENDRA SASTRA WINATA

NIP 199012302013101001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (22.01) BALI / KAB. BULELENG
Satuan Kerja : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA52559100-
No Rekening : 00000000497043924
Nama Rekening : RPL 132 KPKNL SINGARAJA UTK PS TKPKN
Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - SINGARAJA
Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

Ditandatangani secara elektronik
PUTU HENDRA SASTRA WINATA

NIP 199012302013101001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya





NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (525591)

Cetak Tanggal 02-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	132	524320	11-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208975902000	3517A5BBSCBPKVQ9 458054406786	411121	IDR	411,600	ADA
2	132	524320	11-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGA 000208975902000	7BDDC5BBSCBP4FH T 469157412087	411121	IDR	411,600	ADA
TOTAL								823,200	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199012302013101001 pada 02-01-2025 09:04:36 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (525591)

Cetak Tanggal 02-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	132	525591	27-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGAR 0000000000000000	644C57NAPH02J9Q7 198709638886	815111	IDR	7,623,000	ADA
2	132	525591	30-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGAR 0000000000000000	944D01GCAN08CG51 211570562346	815113	IDR	13,032,500	ADA
3	132	525591	30-Des-24	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGAR 0000000000000000	34ED57NAPH0V7GAE 876207570568	815511	IDR	24,313,000	ADA
TOTAL								44,968,500	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicitak oleh 199012302013101001 pada 02-01-2025 09:04:36 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (525591)

Cetak Tanggal 02-01-2025

Periode : 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199012302013101001 pada 02-01-2025 09:04:36 WIB.

LAPORAN SALDO REKENING
KPKNL SINGARAJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

No.	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es.1	Kode Satker	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1	015	09	525591	9890145255911000	BPG 132 KPKNL SINGARAJA	VA		PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.	PECENONGAN	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18 Februari 2020	30-12-2024	0	
2															
JUMLAH														0	
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara															
1	015	09	525591	0497043924	RPL 132 KPKNL SINGARAJA UTK PS TKPKN	Giro		PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.	SINGARAJA	Giro	S-10076/MK.5/2016	13 Desember 2016	27-03-2024	0	
2															
JUMLAH														0	

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
 Adi Purwoko
 NIP 19791106 200212 1 001





Mutasi Transaksi (01/12/2024 - 31/12/2024)

downloaded at 01/01/2025 18:17:21

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (525591)									
Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)									
Rekening Satker : BPG 132 KPKNL Singaraja (9890145255911000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-30	09:37:09	455313	TARIK TUNAI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja OPERASION	Rp. 28,008,745	Rp. 28,008,745	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2024-12-27	08:17:11	638886	TRANSFER KE 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 35,631,745	Rp. 7,623,000	-	Rp. 28,008,745	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	13:50:14	465388	TARIK TUNAI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja PUTU HEND	Rp. 70,631,745	Rp. 35,000,000	-	Rp. 35,631,745	(TELLER)	(Empty)
2024-12-16	08:27:05	287261	TARIK TUNAI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja PUTU HEND	Rp. 110,631,745	Rp. 40,000,000	-	Rp. 70,631,745	(TELLER)	(Empty)
2024-12-11	08:44:59	406786	TRANSFER KE 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 111,043,345	Rp. 411,600	-	Rp. 110,631,745	(TELLER)	(Empty)
2024-12-11	08:44:58	412087	TRANSFER KE 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 111,454,945	Rp. 411,600	-	Rp. 111,043,345	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	10:05:47	692666	TARIK TUNAI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja PUTU HEND	Rp. 156,454,945	Rp. 45,000,000	-	Rp. 111,454,945	(TELLER)	(Empty)
2024-12-05	09:19:00	521289	TRANSFER DARI 2020200263 241321303000796000001 32130300079600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 110,754,945	-	Rp. 45,700,000	Rp. 156,454,945	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	09:27:55	126309	TRANSFER DARI 2020200263 241321303000793000001 32130300079300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 21,554,945	-	Rp. 89,200,000	Rp. 110,754,945	(SPAN)	(Empty)
2024-12-03	14:25:35	296269	TRANSFER DARI 2020200263 241321303000789000001 32130300078900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 448,245	-	Rp. 21,106,700	Rp. 21,554,945	(SPAN)	(Empty)
2024-12-03	07:23:36	556889	TARIK TUNAI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja OPERASION	Rp. 41,948,245	Rp. 41,500,000	-	Rp. 448,245	(TELLER)	(Empty)
2024-12-02	14:56:55	682805	TRANSFER DARI 2020200263 241321303000784000001 32130300078400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890145255911000 BPG 132 KPKNL Singaraja	Rp. 459,845	-	Rp. 41,488,400	Rp. 41,948,245	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA (525591)

Rekening Induk : RKK DJKN Kemenkeu OPS (2020200263)

Rekening Satker : BPG 132 KPKNL Singaraja (9890145255911000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi	
Total Mutasi						Rp. 197,954,945	Rp. 197,495,100	Rp. 0		

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

KPKNL SINGARAJA
Gedung Keuangan Negara Unit II, Jalan
Nomor 10, Singaraja, Bali

Account No. : 497043924 / RPL 132 KPKNL SINGARAJA UTK PS TKPKN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Desember-24 - 31-Desember-24
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00

Ending Balance : 0.00
Total Debet : 1 0.00
Total Credit : 1 0.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (22.01) BALI / KAB. BULELENG
 Satuan Kerja : (525591) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-015.09.2.525591/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (132) Singaraja
 Alamat dan No Telp : Jl. Udayana 10 (GKN II) Singaraja , 036232811 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 89.687.779,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00255/SSBPD/525591/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	489.454.779,00	36.923.042.901,00	37.322.809.901,00	89.687.779,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	489.454.779,00	36.923.042.901,00	37.322.809.901,00	89.687.779,00
B.	BP Selain Kas	489.454.779,00	36.923.042.901,00	37.322.809.901,00	89.687.779,00
	1. BP PNBP	0,00	1.040.033.477,00	1.040.033.477,00	0,00
	2. BP DPK	489.454.779,00	35.233.718.783,00	35.633.485.783,00	89.687.779,00
	3. BP Pajak	0,00	649.290.641,00	649.290.641,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	89.687.779,00
		(*)
3. Jumlah Kas	Rp	89.687.779,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	89.687.779,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	89.687.779,00
		(*)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.689.324.118,00
		(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.689.324.118,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.689.324.118,00
		(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.040.033.477,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.180.520.640,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 140.487.163,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 140.487.163,00 karena Selisih didapatkan dikarenakan terdapat setoran PNBPN yang dilakukan mandiri oleh satker yaitu setoran Bea Bea Lelang Pegadaian (425784), Bea Permohonan Lelang dan Bea Lelang Batal.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ADI PURWOKO
NIP 197911062002121001

KAB. BULELENG , 06 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



GALIH DAHANA

NIP 199703072018121002




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) UNIT 2, JALAN UDAYANA NO. 10, SINGARAJA - 81116
TELEPON (0382) 32811, 32812

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Per Desember 2024

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2024	
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:	Rp	0,00
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp	0,00
	2. Bea Lelang	Rp	0,00
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL		
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp	0,00
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	Rp	0,00
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	Rp	0,00
	6. PPh		
	Jumlah A	Rp	0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak Ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari :		
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp	0,00
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp	0,00
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp	0,00
	4. Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp	0,00
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp	0,00
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp	0,00
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp	0,00
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp	0,00
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp	0,00
	10. Lain-lain Lelang	Rp	89.670.296,00
	11. Lain-lain Piutang	Rp	17.483,00
	Jumlah B	Rp	89.687.779,00
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp	0,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp	0,00
	Jumlah A+B+C+D	Rp	89.687.779,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ADI PURWOKO
NIP. 197911062002121001

Singaraja, 06 Januari 2024
Bendahara Penerimaan


Galih Dahana
NIP 199703072018121002



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 525591
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,854,009,000	1,854,009,000	0
2	Belanja	1,799,653,167	1,799,653,167	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,949,612,000	2,949,612,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,159,076,414	5,159,076,414	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-FEB-25





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-245/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Lelang
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Rekonsiliasi Internal PNBP Lelang Periode 31 Maret
2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 2 April 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Bea Lelang terdiri dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan PNBP Bea Lelang Pegadaian periode pelaporan 31 Maret Tahun 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-09/KNL.1402/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 (dua), bulan April tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. I Made Adi Wasgita, Operator GLP selanjutnya disebut Pihak Pertama dan
2. Irfan Jarot, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBP yang Berasal dari Bea Lelang Pegadaian antara PNBP OMSPAN dengan data PNBP *sharing folder dropbox* lelang periode 31 Maret 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBP yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox Lelang	Selisih
1.	MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	103.153.756	103.153.756	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Irfan Jarot

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
I Made Adi Wasgita

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



LAMPIRAN
Berita Acara Kepala KPKNL
Nomor : BA-09/KNL.1402/2024
Tanggal 2 April 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pelaksanaan Lelang
OMSPAN
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : 103.153.756

Dropbox Lelang
MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : 103.153.756
2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-08/KNL.1402/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 (dua), bulan April tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. I Made Adi Wasgita, Operator GLP selanjutnya disebut Pihak Pertama dan
2. Irfan Jarot, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I antara PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *sharing folder dropbox* lelang periode 31 Maret 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox Lelang	Selisih
1.	MAP 425782 Bea Lelang PL I	666.644.747	666.644.747	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Irfan Jarot

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
I Made Adi Wasgita

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



LAMPIRAN
Berita Acara Kepala KPKNL
Nomor : BA-08/KNL.1402/2024
Tanggal 2 April 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pelaksanaan Lelang :
OMSPAN
MAP 425782 Bea Lelang PL I : 666.644.747

Dropbox Lelang : 666.644.747
MAP 425782 Bea Lelang PL I
2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-244/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan
Piutang Negara Periode 31 Maret 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 2 April 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan Piutang Negara periode pelaporan 31 Maret Tahun 2024 untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:
1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-10/KNL.1402/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 (dua), bulan April tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. Rudiyanto Sjahril, Kepala Subbagian Umum selanjutnya disebut Pihak Pertama
dan
2. Dini Indri Irianti, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *Focus* PN periode 31 Maret 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	FocusPN	Selisih
1.	MAP 425785 Biaya Administrasi Piutang Negara	4.545.455	4.545.455	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Dini Indri Irianti

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
Rudiyanto Sjahril

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL

Nomor : BAR- 10/KNL.1402/2024

Tanggal 2 April 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP FocusPN sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pengurusan Piutang Negara
OMSPAN
MAP 425785 Biad Piutang Negara : 4.545.455

Focus PN
MAP 425785 Biad Piutang Negara : 4.545.455
2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-449/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Lelang
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Rekonsiliasi Internal PNBP Lelang Periode 30 Juni 2024
pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 9 Juli 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Bea Lelang terdiri dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan PNBP Bea Lelang Pegadaian periode pelaporan 30 Juni Tahun 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-450/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan
Piutang Negara Periode 30 Juni 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 9 Juli 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan Piutang Negara periode pelaporan 30 Juni Tahun 2024 untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:
1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-707/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Lelang
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Rekonsiliasi Internal PNBP Lelang Periode 30
September 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 7 Oktober 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Bea Lelang terdiri dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan PNBP Bea Lelang Pegadaian periode pelaporan 30 September Tahun 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan sepenuh hati dengan semangat SAKTI (Santun-Akuntabel-Kolaborasi - Transparansi - Integritas).

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-34/KNL.1402/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 7 (tujuh), bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. I Made Adi Wasgita, Operator GLP selanjutnya disebut Pihak Pertama
dan
2. Irfan Jarot, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal dari Bea Lelang Pegadaian antara PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *sharing folder dropbox* lelang periode 30 September 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox Lelang	Selisih
1.	MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian	383.113.260	383.113.260	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Irfan Jarot

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
I Made Adi Wasgita

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL

Nomor : BA-34/KNL.1402/2024

Tanggal 7 Oktober 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pelaksanaan Lelang

OMSPAN

MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : 383.113.260

Dropbox Lelang

MAP 425784 Bea Lelang Pegadaian : 383.113.260

2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-33/KNL.1402/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 7 (tujuh), bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. I Made Adi Wasgita, Operator GLP selanjutnya disebut Pihak Pertama
dan
2. Irfan Jarot, Petugas Pelaporan Lelang, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I antara PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *sharing folder dropbox* lelang periode 30 September 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox Lelang	Selisih
1.	MAP 425782 Bea Lelang PL I	2.252.905.794	2.252.905.794	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Irfan Jarot

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
I Made Adi Wasgita

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala KPKNL

Nomor : BA-33/KNL.1402/2024

Tanggal 7 Oktober 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP Dropbox lelang sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pelaksanaan Lelang :
OMSPAN
MAP 425782 Bea Lelang PL I : 2.252.905.794

Dropbox Lelang : 2.252.905.794
MAP 425782 Bea Lelang PL I
2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-706/KNL.1402/2024

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan
Piutang Negara Periode 30 September 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 7 Oktober 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan Piutang Negara periode pelaporan 30 September Tahun 2024 untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan sepenuh hati dengan semangat SAKTI (Santun-Akuntabel-Kolaborasi - Transparansi - Integritas).

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko

Tembusan:
1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : BA-35/KNL.1402/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 7 (tujuh), bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KPKNL Singaraja, kami masing- masing :

1. Rudiyanto Sjahril, Kepala Subbagian Umum selanjutnya disebut Pihak Pertama
dan
2. Dini Indri Irianti, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selanjutnya disebut Pihak Kedua

Telah melaksanakan rekonsiliasi internal Pelaporan PNBPN yang Berasal Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara antara data PNBPN OMSPAN dengan data PNBPN *Focus* PN periode 30 September 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data PNBPN yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	OMSPAN	FocusPN	Selisih
1.	MAP 425785 Biaya Administrasi Piutang Negara	454.920.537	454.920.537	-

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Singaraja

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik
Dini Indri Irianti

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
Rudiyanto Sjahril

Menyetujui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko



LAMPIRAN
Berita Acara Kepala KPKNL
Nomor : BAR- 35/KNL.1402/2024
Tanggal 7 Oktober 2024

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP FocusPN sampai dengan periode pelaporan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. PNBP Pengurusan Piutang Negara
OMSPAN
MAP 425785 Biad Piutang Negara : 454.920.537

Focus PN
MAP 425785 Biad Piutang Negara : 454.920.537
2. Penjelasan atas selisih : -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-24/KNL.1402/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Lelang
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Rekonsiliasi Internal PNBP Lelang Periode 31
Desember 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 7 Januari 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Bea Lelang terdiri dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan PNBP Bea Lelang Pegadaian periode pelaporan 31 Desember Tahun 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan sepenuh hati dengan semangat SAKTI (Santun–AkuntabelKolaborasi - Transparansi - Integritas).

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

NOTA DINAS
NOMOR ND-25/KNL.1402/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan
Piutang Negara Periode 31 Desember 2024 pada KPKNL Singaraja
Tanggal : 7 Januari 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi internal PNBP DJKN, bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Internal PNBP Biad Pengurusan Piutang Negara periode pelaporan 31 Desember Tahun 2024 untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan sepenuh hati dengan semangat SAKTI (Santun-Akuntabel - Kolaborasi - Transparansi - Integritas).

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja Telepon : (0362) 32811, 32812 Faksimile : (0362) 32814

BERITA ACARA OPNAME FISIK

Nomor : BA-4/KNL.1402/2025

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Gudang Persediaan/Tempat Penyimpanan KPKNL Singaraja Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja, Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Nawiana
NIP : 19690311 199403 1 003
Jabatan : Pejabat Pengurus Persediaan
KPKNL Singaraja

Nama : Rudiyanto Sjahril
NIP : 19701204 199203 1 002
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
KPKNL Singaraja

Berdasarkan PMK Nomor 88/PMK.01/2022 dan PMK Nomor 181/PMK.06 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, telah melaksanakan Inventarisasi, Pengecekan dan Pemeriksaan atas Barang Persediaan milik Satuan kerja KPKNL Singaraja dengan daftar hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Opname Fisik ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang melaksanakan
Inventarisasi Barang Persediaan,

Kepala Subbagian Umum
KPKNL Singaraja



Ditandatangani secara elektronik
Rudiyanto Sjahril

Pejabat Pengurus Persediaan
KPKNL Singaraja



Ditandatangani secara elektronik
I Wayan Nawiana

Mengetahui
Kepala KPKNL



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko



BERITA ACARA
HASIL SENSUS BARANG MILIK NEGARA
PADA KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : BA-31/KNL.1402/2024

Pada tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di KAB. BULELENG, Alamat Jl. udayana no 10, kami telah melakukan sensus Barang Milik Negara pada Satker KPKNL SINGARAJA, dengan hasil sebagai berikut :

a. Ikhtisar Sensus BMN :

Menurut Administrasi : Rp3,162,247,252.00
Menurut Inventarisasi : Rp3,162,247,252.00
Selisih : Rp0.00

b. Penjelasan Selisih

c. Informasi Tambahan

Untuk selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dilampirkan :

- 1) Surat Penetapan Hasil Sensus BMN
- 2) Rekapitulasi Hasil Sensus
- 3) Daftar Barang Hasil Sensus - Kondisi Baik ;
- 4) Daftar Barang Hasil Sensus - Kondisi Rusak Ringan ;
- 5) Daftar Barang Hasil Sensus - Kondisi Rusak Berat ;
- 6) Daftar Barang Hasil Sensus - Berlebih ;
- 7) Daftar Barang Hasil Sensus - Tidak Ditemukan ;
- 8) Daftar Barang Hasil Sensus - Barang Dalam Sengketa ;
- 9) Catatan Atas Hasil Sensus; dan
- 10) Catatan Pelaksanaan Sensus BMN.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai laporan pelaksanaan sensus Barang Milik Negara pada Satker KPKNL SINGARAJA. Apabila ditemukan permasalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan



Lucillus Wawang Cailendra Hidajat
196810311996031001

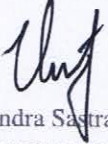
Rudiyanto Sjahril
197012041992031002

I Made Adi Wasgita
199011022012101003

I Wayan Nawiana

Tim Inventarisasi

196903111994031003



Putu Hendra Sastra Winata
199012302013101001



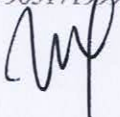
Ni Made Arinda Naraswary
200011102019122001



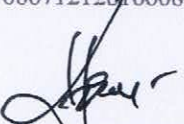
Omar Arief Audris
198703142008121002



Krismartino Waluyanto
197903171999031002



Putu Aryawan
5108071212810008



Dayu Kade Ety Suastrini
5108046208900002

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PERIODE 31 DESEMBER 2024

Kode BA dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Kode E1 dan Nama E1 : (09) DJKN

Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (14) Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Kode Satker dan Nama Satker: (525591) KPKNL Singaraja

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akruwal Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akruwal	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	N/A	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak

9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		√	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak

3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	N/A	N/A	
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A	N/A	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak

4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya

TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

TELAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		√	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		√	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		√	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		√	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		√	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		√	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		√	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		√	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		√	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		√	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		√	Ya

7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		√	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Semua akun telah sesuai.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
I Made Adi Wasgita

Singaraja, 7 Mei 2025
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko

